

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
2. bahwa Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

dan

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barru.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Puskesmas dan Jaringannya.
18. UPTD Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
19. Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta adalah pembayaran atas pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.
23. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**

**NAMA, JENIS DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Pasal 3**

1. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

**BAB III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**BAB IV**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB VI**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 7**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

**Pasal 8**

1. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 9**

1. Struktur dan besarnya tarif pelayanan adalah merupakan penjumlahan dari komponen jasa sarana dan tarif komponen jasa pelayanan.
2. Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:
3. **Pada Puskesmas Pembantu dan Puskesmas :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tindakan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| I | Pelayanan kebutuhan |   |   |   |
| 1 | Rawat inap Puskesmas | 40.000 | 30.000 | 70.000 |
| 2 | Rawat Jalan (Penderita yang mendapat pelayanan pemeriksaan dari :) |   |   |   |
|   |  - Dokter ahli | 17.000 | 15.000 | 32.000 |
|   |  - Dokter umum/gigi | 11.000 | 9.000 | 20.000 |
|   |  - Paramedis S1 | 4.000 | 6.000 | 10.000 |
|   |  - Paramedis Non S1 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| 3 | Penggunaan tabung oksigen per/3 ltr/jam | 2.500 | - | 2.500 |
| 4 | Kunjungan ANC/Kunjungan | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
| 5 | Kunjungan PNC/Kunjungan | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
| 6 | Biaya persalinan/ 1 kali menolong | 135.000 | 108.000 | 243.000 |
| 7 | Biaya kunjungan neonatus/kunjungan | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut |   |   |   |
|   |  - Pemeriksaan dan pembersihan karang/regio | 78.000 | 55.000 | 133.000 |
|   |  - Perawatan radang gigi | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
|   |  - Perawatan insisi | 20.000 | 13.500 | 33.500 |
|   |  - Pengobatan urat syaraf gigi/kunjungan | 34.000 | 23.000 | 57.000 |
|   |  - Tindakan chirurgig | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
|   |  - Pencabutan gigi/elemen | 12.500 | 9.000 | 21.500 |
|   |  - Pencabutan gigi dengan komplikasi/pecah | 35.000 | 20.000 | 55.000 |
|   |  - Pencabutan/ondontektomi gigi terbenam/ekserpasi kristal | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
|   |  - Alveo lektomi setiap daerah gigi | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
|   |  - Tambahan amalgam/silicat per elemen | 61.500 | 45.500 | 107.000 |
|   |  - Tambahan sementara per elemen | 34.000 | 23.000 | 57.000 |
|   |   |   |   |   |
| 9 | Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya |   |   |   |
|   |  - Tes malaria / rapid test | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
|   |  - Tes tuberkulin | 35.000 | 23.000 | 58.000 |
|   |  - DOR/DDR | 20.000 | 13.500 | 33.500 |
|   |  - Pemeriksaan gram | 10.000 | 6.500 | 16.500 |
|   |  - Anti deangue IGM&196 | 70.000 | 45.000 | 115.000 |
|   |  - Tes koagulasi | 500 | 3.000 | 3.500 |
|   |  - Hb | 10.000 | 6.500 | 16.500 |
|   |  - Trombosit | 8.500 | 5.500 | 14.000 |
|   |  - Leukosit/ LED | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
|   |  - Golongan darah | 15.500 | 10.500 | 26.000 |
|   |  - Tes kehamilan | 11.000 | 7.500 | 18.500 |
|   |  - faeces | 7.000 | 6.000 | 13.000 |
|   |  - Urine lengkap | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
|   |  - Pap smear | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
|   |  - Widal | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
|   |  - HBSAg | 32.000 | 22.000 | 54.000 |
|   |  - GDS | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
|   |  - Asam urat | 27.000 | 18.000 | 45.000 |
|   |   |   |   |   |
| 10 | Pengujian kesehatan |   |   |   |
|   |  - Umum  | 8.000 | 5.000 | 13.000 |
|   |  - Anak sekolah | 8.000 | 5.000 | 13.000 |
|   |   |   |   |   |
| 11 | Pemeriksaan kesehatan calon pengantin | 8.000 | 5.000 | 13.000 |
|   |   |   |   |   |
| 12 | Pelayanan kesehatan UGD |   |   |   |
|   |  - Penyunatan /Sircumsisi | 119.000 | 81.000 | 200.000 |
|   |  - Kontrol pasien sunat | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
|   |  - Tindik daun telinga | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
|   |  - Kumbah lambung | 28.500 | 19.000 | 47.500 |
|   |  - Pemasangan infus | 11.500 | 8.500 | 20.000 |
|   |  - Pemasangan sonde | 26.000 | 39.000 | 65.000 |
|   |  - Resusitasi | 20.000 | 13.500 | 33.500 |
|   |  - Pemasangan kateter | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
|   |  - Aff kateter | 7.500 | 6.000 | 13.500 |
|   |  - cross incisi | 35.000 | 24.000 | 59.000 |
|   |  - Incisi Abses | 20.000 | 13.500 | 33.500 |
|   |  - Ekstirpasi kuku | 27.000 | 18.000 | 45.000 |
|   |  - Rawat Luka / Kompres | 7.500 | 5.000 | 12.500 |
|   |  - Ganti perban | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
|   |  - Tusse | 32.000 | 22.000 | 54.000 |
|   |  - ekstirpasi besar / kecil | 30.500 | 20.500 | 51.000 |
|   |  - injeksi | 7.000 | 4.500 | 11.500 |
|   |  - pemasangan O2 | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
|   |  - Luka bakar | 16.000 | 11.000 | 27.000 |
|   |  - Hecting Luka | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
|   |  - Aff Hecting  | 13.000 | 9.000 | 22.000 |
|   |  - necrotomy | 16.000 | 11.000 | 27.000 |
|   |   |  |  |  |
| 13 | Pemeriksaan calon jamaah haji |   |   |   |
|   |  - Pemeriksaan kesehatan tingkat pertama | 50.000 | 12.000 | 62.000 |
|   |  - Pemberian vaksin anti flu | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
|   |  - Pemberian vaksin meningitis | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
|   |   |   |   |   |
| 14 | Pelayanan Imunisasi |   |   |   |
|   |  - Vaksin Hb O | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
|   |  - Vaksin anti rabies / injeksi | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
|   |  - Vaksin TT Bumil / kunjungan | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
|   |  -Vaksin anti flu | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
|   |  - Vaksinasi injeksi lainnya | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
|   |   |   |   |   |
| 15 | Pelayanan Keluarga Berencana |   |   |   |
|   |  - Pemasangan implant | 35.000 | 23.500 | 58.500 |
|   |  - Pencabutan implant | 49.000 | 33.000 | 82.000 |
|   |  - Pemasangan IUD | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
|   |  - Pencabutan IUD | 40.000 | 27.000 | 67.000 |
|   |  - Suntik KB | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
|   |   |   |   |   |
| 16 | Otopsi | 190.000 | 127.000 | 317.000 |
|   |   |   |   |   |
| 17 | Pelayanan Mobil Ambulance dan jenazah |   |   |   |
|   |  - Ambulance ( dalam kota ) | 70.000 | 50.000 | 120.000 |
|   |  - Ambulance ( luar kota per kilometer ) | 1.400 | 1.000 | 2.400 |
|   |  - Mobil Jenazah ( dalam kota ) | 100.000 | 67.000 | 167.000 |
|   |  - Mobil Jenazah ( luar kota perkilometer ) | 2.000 | 1.350 | 3.350 |

1. **Pada Rumah Sakit Umum Daerah :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Tarif Rawat Jalan** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  |  | Pemeriksaan Oleh : |  -  | -  | -  |  |
|  |  1 |  - Bidan |  6.500  | 5.500 | 12.000 |  |
|  |  2 |  - Dokter Umum |  11.000  | 9.000 | 20.000 |  |
|  |  3 |  - Dokter Spesialis |  17.000  | 15.000 | 32.000 |  |
|  |  4 |  - Dokter Sub Spesialis |  23.000  | 19.000 | 42.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pasien Dengan Tindakan Medik** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Cross Incisi |  35.000  |  24.000  |  59.000  |  |
|  | 2 | Tusse |  32.000  |  22.000  |  54.000  |  |
|  | 3 | Biopsi |  49.000  |  33.000  |  82.000  |  |
|  | 4 | Circumsisi |  119.000  |  81.000  |  200.000  |  |
|  | 5 | Electroceuternisasi |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | 6 | Insisi Abses |  20.000  |  13.500  |  33.500  |  |
|  | 7 | Exterpasi Besar & Kecil |  30.500  |  20.500  |  51.000  |  |
|  | 8 | Injeksi Kiloid |  7.000  |  5.000  |  12.000  |  |
|  | 9 | Inxterpasi Kuku |  27.000  |  18.000  |  45.000  |  |
|  | 10 | Rawat Luka/Kompres |  7.500  |  5.000  |  12.500  |  |
|  | 11 | Semprot Larva Cacing |  10.000  |  7.000  |  17.000  |  |
|  | 12 | Ganti Perban |  6.000  |  4.000  |  10.000  |  |
|  | 13 | TT Ibu Hamil/Capim |  7.000  |  5.000  |  12.000  |  |
|  | 14 | Pemeriksaan Penyakit Kandungan/Inspekula | 7.000 | 5.000 | 12.000 |  |
|  | 15 | VP Peny. Kandungan/Kelamin |  7.000  |  5.000  |  12.000  |  |
|  | 16 | Ganti Verban |  9.000  |  6.000  |  15.000  |  |
|  | 17 | Perawatan Luka (Post SC)/Aff Hecting |  15.000  |  10.000  |  25.000  |  |
|  | 18 | Suntik KB |  3.000  |  2.000  |  5.000  |  |
|  | 19 | Pemasangan IUD |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | 20 | Pencabutan IUD |  40.000  |  27.000  |  67.000  |  |
|  | 21 | Pemasangan Inplant |  35.000  |  23.500  |  58.500  |  |
|  | 22 | Pencabutan Inplant | 49.000 |  33.000  |  82.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Pasien Rawat Darurat** |  |  |  |  |
|  | **Tanpa Tindakan** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  |  | Pemeriksaan Oleh : |   |   |   |  |
|  |  1 |  - Dokter Umum | 10.000 | 9.000 | 19.000 |  |
|  |  2 |  - Dokter Spesialis | 17.000 | 14.000 | 31.000 |  |
|  |  3 |  - Dokter Sub Spesialis | 22.000 | 19.000 | 41.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dengan Tindakan** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Pemasangan O2 |  6.000  |  4.000  | 10.000 |  |
|  | 2 | Skin Test |  13.500  |  9.000  | 22.500 |  |
|  | 3 | Injeksi |  7.000  |  4.500  | 11.500 |  |
|  | 4 | Pemakaian Nebuliser |  24.000  |  16.000  | 40.000 |  |
|  | 5 | Pemakaian Suction |  19.000  |  13.000  | 32.000 |  |
|  | 6 | Debsi Demen Luka Lecet/Ringan |  16.000  |  11.000  | 27.000 |  |
|  | 7 | Debsi Demen Luka lecet Sedang |  30.000  |  20.000  | 50.000 |  |
|  | 8 | Depsi Demen Lika LecetLuas/ Berat |  54.000  |  36.000  | 90.000 |  |
|  | 9 | Hecting Luka ringan |  30.000  |  20.000  | 50.000 |  |
|  | 10 | Hacting Luka Sedang |  64.000  |  43.000  | 107.000 |  |
|  | 11 | Hecting Luka Berat (Multiple Bleeding) |  110.000  |  74.000  | 184.000 |  |
|  | 12 | Depsi Demen Luka Bakar 1-27 % |  41.000  |  27.500  | 68.500 |  |
|  | 13 | Depsi Demen Luka Bakar 27-50% |  70.000  |  47.000  | 117.000 |  |
|  | 14 | Depsi Demen Luka Bakar > 50% |  143.000  |  96.000  | 239.000 |  |
|  | 15 | Depsi Demen Luka Infeksi (Lika Diabetik Ringan) |  28.500  |  19.000  | 47.500 |  |
|  | 16 | Depsi Demen Luka Infeksi (Lika Diabetik Berat) |  53.000  |  36.000  | 89.000 |  |
|  | 17 | Insisi Abses |  38.000 |  26.000  | 64.000 |  |
|  | 18 | Cross Insisi |  35.000 |  24.000  | 59.000 |  |
|  | 19 | Aff Hecting |  13.000  |  9.000  | 22.000 |  |
|  | 20 | Pasang Keteter |  30.000  |  20.000  | 50.000 |  |
|  | 21 | Aff Keteter |  7.500  |  6.000  | 13.500 |  |
|  | 22 | Pasang NGT |  20.000  |  13.500  | 33.500 |  |
|  | 23 | Kumbah Lambung |  28.500  |  19.000  | 47.500 |  |
|  | 24 | Pasang Infus pd anak |  11.500  |  8.500  | 20.000 |  |
|  | 25 | Pasang Infus pd Bayi |  15.000  |  10.000  | 25.000 |  |
|  | 26 | Pasang Infus pd Pasien Shock /Dehidrasi Berat |  15.000 |  10.000  | 25.000 |  |
|  | 27 | Vena Seksi |  38.500 |  25.500  | 64.000 |  |
|  | 28 | Pemasangan Alat EKG |  14.500  |  9.500  | 24.000 |  |
|  | 29 | Reposisi Tulang |  17.500  |  12.500  | 30.000 |  |
|  | 30 | Reposisi Mandibuk |  13.000  |  9.000  | 22.000 |  |
|  | 31 | Resusitasi Kardio Pulmonari |  20.000  |  13.500  | 33.500 |  |
|  | 32 | Necrotomy |  123.000  |  83.000  | 206.000 |  |
|  | 33 | Observasi ODC |  30.000  |  20.000  | 50.000 |  |
|  | 34 | Spuuling Mata |  19.000  |  13.000  | 32.000 |  |
|  | 35 | Eksterpasi Kuku |  34.500  |  23.000  | 57.500 |  |
|  | 36 | Mengeluarkan Benda Asing |  26.000  |  17.500  | 43.500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tindakan Rehabilitasi** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Sort Wafe Diaermi |  36.000 |  24.000  | 60.000 |  |
|  | 2 | Infra Red Rays |  34.000  |  23.000  | 57.000 |  |
|  | 3 | Paradise Endomed |  36.000  |  24.000  | 60.000 |  |
|  | 4 | Traksi Lumbal/Cervical |  42.000  |  28.000  | 70.000 |  |
|  | 5 | Exercise Terapi |  40.000  |  27.000  | 67.000 |  |
|  | 6 | Ultra Sound |  36.000  |  24.000  | 60.000 |  |
|  | 7 | Trad Mill |  23.000  |  15.000  | 38.000 |  |
|  | 8 | Static Bycycle |  24.000  |  16.000  | 40.000 |  |
|  | 9 | Shoulder Will |  29.000  |  20.000  | 49.000 |  |
|  | 10 | Electric Simultan Tens |  27.000  |  18.000  | 45.000 |  |
|  | 11 | Parafin Batc |  32.000  |  21.500  | 53.500 |  |
|  | 12 | Traksi Elektrus |  29.000  |  20.000  | 49.000 |  |
|  | 13 | Tilting Table USD |  24.000  |  16.000  | 40.000 |  |
|  | 14 | MWD |  28.000  |  19.000  | 47.000 |  |
|  | 15 | Elect Simultan |  32.000  |  21.500  | 53.500 |  |
|  | 16 | Assesment |  25.500  |  17.500  | 43.000 |  |
|  | 17 | Manual Terapi |  35.000  |  24.000  | 59.000 |  |
|  | 18 | Evaluasi dan dokumentasi  |  25.500  |  17.000  | 42.500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Tarif Rawat Inap** |  |  |  |  |
|  | **Biaya perawatan Per Hari** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Kelas III |  51.000  |  34.000  |  85.000  |  |
|  | 2 | Kelas II |  66.500  |  45.000  |  111.500  |  |
|  | 3 | Kelas I |  100.000  |  67.000  |  167.000  |  |
|  | 4 | Kelas VIP |  140.000  |  94.000  |  234.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Biaya Perhari Bayi Baru Lahir** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Kelas III |  51.000  |  34.000  |  85.000  |  |
|  | 2 | Kelas II |  66.500  |  45.000  |  111.500  |  |
|  | 3 | Kelas I |  100.000  |  67.000  |  167.000  |  |
|  | 4 | Kelas VIP |  140.000  |  94.000  | 234.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAWAT INTENSIF/ICCU/ICU/NICU/PICU**  |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Biaya perhari |  113.000  |  76.000  |  189.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pelayanan Kebidanan** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 |  VOVT  |  10.000  |  7.000  |  17.000  |  |
|  | 2 |  Tindakan Persalinan Normal  |  135.000  |  108.000  |  243.000  |  |
|  | 3 |  Hecting Perineum  |  49.000  |  33.000  |  82.000  |  |
|  | 4 |  Digital Manual  |  20.000  |  14.000  |  34.000  |  |
|  | 5 |  Plasenta Manual  |  45.000  |  30.000  | 75.000  |  |
|  | 6 |  Persalinan Patologis  | 220.000  |  176.000  | 396.000  |  |
|  | 7 |  Aff Tampon  |  15.000  |  10.000  |  25.000  |  |
|  | 8 |  Hukna  |  35.000  |  24.000  |  59.000  |  |
|  | 9 |  Vagina Toilet  |  25.000  |  17.000  |  42.000  |  |
|  | 10 |  Perawatan Tali Pusat  |  16.000  |  11.000  |  27.000  |  |
|  | 11 |  Perawatan Payudara  |  14.000  |  10.000  |  24.000  |  |
|  | 12 |  Kuretase  |  115.000  |  78.000  |  193.000  |  |
|  | 13 |  Vacum Ekstraksi  |  27.000  |  18.000  |  45.000  |  |
|  | 14 |  Episiotomi  |  34.000  |  23.000  |  57.000  |  |
|  | 15 |  memandikan bayi  |  9.000  |  6.000  |  15.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TINDAKAN MEDIK**  |  |  |  |  |
|  | **a. Gigi dan Mulut** |  |  |  |  |
|  | **Sederhana** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Cabut gigi dewasa / gigi |  12.500  |  9.000  |  21.500  |  |
|  | 2 | Cabut gigi anak-anak / gigi |  9.000  |  6.000  |  15.000  |  |
|  | 3 | Tambalan gigi sementara / gigi |  34.000  |  23.000  |  57.000  |  |
|  | 4 | Trepanasi Saluran Akar / gigi (Extirpasi) |  34.000  |  23.000  |  57.000  |  |
|  | 5 | Buka Jahitan |  13.000  |  9.000  |  22.000  |  |
|  | 6 | Kontrol Orthodontic Removable / Kunjungan |  34.000  |  23.000  |  57.000  |  |
|  | 7 | Curretage Pocket/ Gigi |  52.000  |  35.000  |  87.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sedang** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Fraktur Dental/cabut gigi komplikasi  |  68.000  |  46.000  |  114.000  |  |
|  | 2 | Insisi Abses. Biopsi |  34.000  |  23.000  |  57.000  |  |
|  | 3 | Pembersihan Karang Gigi / Rahang |  78.000  |  55.000  |  133.000  |  |
|  | 4 | Tambalan Tetap/ Gigi (Amalgam) |  61.500  |  45.500  |  107.000  |  |
|  | 5 | Tambalan Tetap/ Gigi (Glass Ionomer/ non sinar) |  96.000  |  64.000  |  160.000  |  |
|  | 6 | Kontrol Orthodontic Cekat / kunjungan |  39.000  |  26.000  |  65.000  |  |
|  | 7 | Alveolectomi/ gigi |  39.000  |  26.000  |  65.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Khusus** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Fistulectomy |  119.000  |  95.000  |  214.000  |  |
|  | 2 | Frenectomy |  119.000  |  95.000  |  214.000  |  |
|  | 3 | Girgi Vectomy |  119.000  |  95.000  |  214.000  |  |
|  | 4 | Incisi Mucocele |  119.000  |  95.000  |  214.000  |  |
|  | 5 | Operculectomy | 119.000  |  95.000  |  214.000  |  |
|  | 6 | Penutupan Fistula Oro Antral |  119.000  |  95.000  |  214.000  |  |
|  | 7 | Reposisi dengan Anastesi Lokal |  119.000  |  95.000  |  214.000  |  |
|  | 8 | Tindakan Depening Sulkus |  119.000  |  95.000  |  214.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tindakan Medik Spesialistik** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Spuling Serumen |  32.000  |  23.000  |  55.000  |  |
|  | 2 | Tampon Telinga |  20.000  |  13.500  |  33.500  |  |
|  | 3 | Parasentesi |  44.000  |  30.000  |  74.000  |  |
|  | 4 | Eksterpasi Granuloma |  35.000  |  25.000  |  60.000  |  |
|  | 5 | Tampon Hidung Sementara |  23.000  |  15.000  |  38.000  |  |
|  | 6 | Tampon Hidung Tetap |  44.000  |  30.000  |  74.000  |  |
|  | 7 | Spuling Hidung |  21.000  |  14.000  |  35.000  |  |
|  | 8 | Kateterisasi Tuba |  24.000  |  16.000  |  40.000  |  |
|  | 9 | Insisi Abses Pericemsiler |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | 10 | Elektraksi Corpus Alienum Telinga |  11.000  |  9.000  |  20.000  |  |
|  | 11 | Elektraksi Corpus Alienum Hidung |  35.000  |  25.000  |  60.000  |  |
|  | 12 | Elektraksi Corpus Tenggorokan |  26.000  |  17.500  |  43.500  |  |
|  | 13 | Propakasi ...etmidasi |  11.000  |  9.000  |  20.000  |  |
|  | 14 | Funduscopi |  20.000  |  13.500  |  33.500  |  |
|  | 15 | Pemeriksaan EKG |  46.000  |  34.000  |  80.000  |  |
|  | 16 | Pemeriksaan Audiometri |  18.000  |  12.000  |  30.000  |  |
|  | 17 | Pemeriksaan EEG |  100.000  |  67.000  |  167.000  |  |
|  | 18 | Perspirasi Tes |  18.000  |  12.000  |  30.000  |  |
|  | 19 | Punksi Lumbat |  33.000  |  22.000  |  55.000  |  |
|  | 20 | Replex Cahaya |  18.000  |  12.000  |  30.000  |  |
|  | 21 | Spuling | 16.000 |  11.000  |  27.000  |  |
|  | 22 | Eksisi Herde Ulum | 34.000 |  23.000  |  57.000  |  |
|  | 23 | Eksisi VT(Veterigium) | 49.000 |  33.000  |  82.000  |  |
|  | 24 | Eksisi Tumor Palpebra | 56.000 |  44.000  |  100.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **E.4. Tindakan operasi** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |
|  | JASA MEDIK | JASA ANASTESI |
|  | 1 | Operasi Kecil |  215.000  |  143.000  |  57.000  |  415.000  |
|  | 2 | Operasi Sedang |  840.000  |  562.000  |  225.000  | 1.627.000  |
|  | 3 | Operasi Besar | 1.550.000  |  1.240.000  |  496.000  | 3.286.000  |
|  | 4 | Operasi Khusus | 2.100.000  |  1.890.000  |  756.000  | 4.746.000  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK** |  |  |  |  |
|  | **Patologi Klinik** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | **A** | **Pemeriksaan Darah lengkap**  |   |  |   |  |
|  | 1  | HB Manual  |  10.000  |  6.500  |  16.500  |  |
|  | 2  | Leucosit Manual  |  6.000  |  4.000  |  10.000  |  |
|  | 3  | LED Manual  |  8.000  |  5.000  |  13.000  |  |
|  |  4  | Trombosit Manual  |  8.500  |  5.500  |  14.000  |  |
|  |  5  | Pemeriksaan darah lengkap automatic  |  80.000  |  50.000  |  130.000  |  |
|  | **B**  | **Test Koagulasi**  |  |  |  |  |
|  | 1  | Waktu Perdarahan  |  9.000  |  6.000  |  15.000  |  |
|  | 2  | Waktu Pembekuan  |  9.000  |  6.000  |  15.000  |  |
|  | 3  | Acivated Prothrombin time (aPTT)  |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | 4 | Protrombin time (PT)  |  30.000  |  20.000  | 50.000  |  |
|  | 5  | Fibrinogen  |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | 6  | Trombine Time (TT)  |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | **C**  | **Test Hematologi Lain**  |  |  |  |  |
|  | 1  | Golongan Darah  |  15.500  |  10.500  |  26.000  |  |
|  | 2 |  Test Malaria (DDR)  |  20.000  |  13.500  |  33.500  |  |
|  | 3 |  Test Apusan Darah Tepi  |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | **D** | **Test Immunologi**  |  |  |  |  |
|  |  1  | Tes Widal  |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  |  2  | Test Rapid HBsAg  |  32.000  |  22.000  |  54.000  |  |
|  |  3  | Test Anti HBsAg  |  32.000  |  22.000  |  54.000  |  |
|  | 4 | Test Rpid HCV  |  46.000  |  37.000  |  83.000  |  |
|  | 5 | Test Rapid HIV  |  46.000  |  37.000  |  83.000  |  |
|  | 6 | Rapid antidengue igM & igG  |  70.000  |  45.000  |  115.000  |  |
|  | 7 | Test Rapid Dengue Duo NSi  |  80.000  |  53.000  |  133.000  |  |
|  | 8 | Test Rapid Malaria  |  60.000  |  40.000  | 100.000  |  |
|  | 9 | Test tuberkulin  |  35.000  |  23.000  |  58.000  |  |
|  | 10 | Test rematoid factor (RF)  |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | 11 | Test anti streptolisin O  |  50.000  |  33.500  |  83.500  |  |
|  | 12 | Test rapid VDLR  |  32.000  |  21.000  |  53.000  |  |
|  |  13  | Test Elektrolit Lengkap  |  60.000  |  40.000  |  100.000  |  |
|  |  14  | Test Analisa Gas Darah  |  55.000  |  36.500  |  91.500  |  |
|  | **E** | **Test Fungsi Hati**  |  |  |  |  |
|  | 1 |  Test Aspartat Transaminase (AST/GOT)  |  34.000  |  22.500  |  56.500  |  |
|  | 2 | Tes alanin transminase  |  34.000  |  22.500  |  56.500  |  |
|  | 3 |  Tes Gamma glutamyl transferase (GGT)  |  17.000  |  11.500  |  28.500  |  |
|  | 4 |  Tes Alkaline Phosfate  |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | 5 |  Tes Bilirubin total dn direct  |  30.000  |  20.000  |  50.000  |  |
|  | 6 |  Tes protein total  |  27.000  |  18.000  |  45.000  |  |
|  | 7 |  Tes albumin  |  27.000  |  18.000  |  45.000  |  |
|  | 8 | Tes lactat dehidrogenase  |  28.000  |  19.000  |  47.000  |  |
|  | **F** | **Tes Diabetes**  |  |  |  |  |
|  |  1 |  Tes Gula darah Sewaktu (GDS)  |  24.000  |  16.000  |  40.000  |  |
|  |  2 |  Tes Gula Darah Puasa (GDP)  |  25.000  |  17.500  |  42.500  |  |
|  |  3 |  Tes toleransi Glukosa oral  |  24.000  |  16.000  |  40.000  |  |
|  |  4 |  Tes chlosterol Total  |  40.000  |  27.000  |  67.000  |  |
|  |  5 |  Tes chlosterol HDL Direct  |  50.000  |  33.500  |  83.500  |  |
|  |  6 |  Tes glserida  |  40.000  |  27.000  |  67.000  |  |
|  |  7 |  Tes Rapid triponim  |  120.000  |  80.000  |  200.000  |  |
|  |  8 |  Tes rapid myoglobin  |  14.000  |  9.380  |  23.380  |  |
|  |  9 |  Tes rapid CKMB  |  80.000  |  50.000  |  130.000  |  |
|  | **G** |  **Tes fungsi Ginjal**  |  |  |  |  |
|  |  1 |  Tes Ureum  |  24.000  |  16.000  |  40.000  |  |
|  |  2 |  Tes creatinim  |  24.000  |  16.000  |  40.000  |  |
|  |  3 |  Tes asam urat  |  27.000  |  18.000  |  45.000  |  |
|  | **H** |  **Pemeriksaan Urinalisis**  |  |  |  |  |
|  |  1 |  Tes urine lengkap  |  12.000  |  8.000  |  20.000  |  |
|  |  2 |  Tes sedimen  |  7.000  |  5.000  |  12.000  |  |
|  |  3 |  Tes kehamilan  |  11.000  |  7.500  |  18.500  |  |
|  |  4 |  Tes Narkoba 3 parameter  |  60.000  |  40.000  |  100.000  |  |
|  | I |  **Tes Analisa Faeces**  |  -  |  -  |  -  |  |
|  |  1 |  Tes faeces rutin  |  7.000  |  6.000  |  13.000  |  |
|  |  2 |  Tes darah samar strip  |  34.000  |  22.000  |  56.000  |  |
|  |  3 |  Tes Mikrobiologi  |  7.000  |  6.000  |  13.000  |  |
|  |  4 |  Tes sputum BTA 1 kali  |  15.000  |  10.000  |  25.000  |  |
|  |  5 |  Pemeriksaan gram  |  10.000  |  6.500  |  16.500  |  |
|  |  6 |  Pemeriksaan PAP SMEAR  |  42.000  |  28.000  |  70.000  |  |
|  |  7 |  Pelayanan sampel gol darah  |  24.000  |  16.000  |  40.000  |  |
|  |  8 |  Pemeriksaan uji saring Cross Matc  |  150.000  |  100.000  |  250.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Radio diagnostik** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  |   | **Sederhana** |   |   |   |  |
|  | 1 | Thorax |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 2 | B.N.O |  63.000  |  42.000  |  105.000  |  |
|  | 3 | Kepala AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 4 | Rahang |  68.000  |  46.000  |  114.000  |  |
|  | 5 | Mastoid Dextra/Sinistra |  68.000  |  46.000  |  114.000  |  |
|  | 6 | Sinus Paranalis Caldwell/Water/Lateral |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 7 | Tempora Mandibular Joint : Open/Closed |  68.000  |  46.000  |  114.000  |  |
|  | 8 | Coll. Vert. Cervikal : AP/Lat. Oblik D & S |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 9 | Coll. Vert. Thoracal : AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 10 | Coll. Vert. Lumbosacral : AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 11 | Pelvis |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 12 | Sendi panggul (Coxae) AP/Oblik |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 13 | Coccygeus Lateral |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 14 | Clavicula |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 15 | Sendi Bahu Endo/Exo Rotasi |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 16 | Humerus : AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 17 | Articulatio Cubiti : AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 18 | Antebrachium : AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 19 | Wrist Joint Pa/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 20 | Manus Pa/Oblik |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 21 | Femur Pa/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 22 | Articulatio Genu : AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 23 | Cruris : AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 24 | Ankle Joint : AP/Lat |  54.000  |  36.000  |  90.000 |  |
|  | 25 | Pedis : AP/Lat/Oblik |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  | 26 | Dental Rontgen (Foto Gigi) |  54.000  |  36.000  |  90.000  |  |
|  |   |   |  |   |  |  |
|  |   | **Sedang** |   |   |   |  |
|  |  1 | USG Abdomen |  80.000  |  60.000  |  140.000  |  |
|  |  2 | USG Obstetri/ Ginekologi |  80.000  |  60.000  |  140.000  |  |
|  |  3 | USG Leher |  80.000  |  60.000  |  140.000  |  |
|  |   |   |  |   |  |  |
|  |   | **Kompleks** |   |   |   |  |
|  |  1 | BNO – IVP |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  2 | Sistografi |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  3 | Uretro Sistografi |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  4 | Oesofagografi |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  5 | Maag Duodenum |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  6 | Colon Inloop |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  7 | Follow Through |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  8 | Fistulografi |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  9 | Cor Analisa |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  10 | Loopografi |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  11 | Histero Salvingografi |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  12 | Bone Survey |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  13 | Myelography |  135.000  |  100.000  |  235.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Diagnostic Elecromedik** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Pasang ECG/ Monitoring |  60.000  |  40.000  |  100.000  |  |
|  | 2 | Pasang SP2 |  45.000  |  30.000  |  75.000  |  |
|  | 3 | Pasang syring pump |  60.000  |  40.000  |  100.000  |  |
|  | 4 | pasang ETT/Inkubasi |  67.000  |  45.000  |  112.000  |  |
|  | 5 | pasang NGT |  62.000  |  42.000  |  104.000  |  |
|  | 6 | pasang Ventilator |  48.000  |  32.000  |  80.000  |  |
|  | 7 | pasang blangket |  50.000  |  33.500  |  83.500  |  |
|  | 8 | pasang CVP |  94.000  |  63.000  |  157.000  |  |
|  | 9 | tindakan Nebulizer |  94.000  |  63.000  |  157.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PELAYANAN LAIN-LAIN** |  |  |  |  |
|  | NO | URAIAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH |  |
|  | 1 | Ambulance (dalam kota) |  70.000  |  50.000  |  120.000  |  |
|  | 2 | Ambulance (luar kota/km) |  1.400  |  1.000  |  2.400  |  |
|  | 3 | Jenasah Dalam kota |  100.000  |  67.000  |  167.000  |  |
|  | 4 | Jenasah Luar kota/km |  2.000  |  1.350  |  3.350  |  |
|  | 5 | Memandikan Jenasah |  83.000  |  67.000  |  150.000  |  |
|  | 6 | Pengawetan Jenazah |  450.000  |  300.000  |  750.000  |  |
|  | 7 | Pemeriksaan Luar Mayat |  46.000  |  30.000  |  76.000  |  |
|  | 8 | Otopsi |  190.000  |  127.000  |  317.000  |  |
|  | 9 | Surat Keterangan Dokter |  8.000  | 5.000  |  13.000  |  |

(3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tidak berlaku setelah status Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

**BAB VII**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan.

**Pasal 11**

1. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
2. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
3. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
4. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
5. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 12**

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat Tinggal
2. Tipe A : Luas ≥ 100 m2 :Rp. 5.000,-/bulan
3. Tipe B : Luas kurang dari 100 m2 :Rp. 3.000,-/bulan
4. Tempat Usaha
	1. Industri, dengan klasifikasi :

kelas A 500 m² ke atas :Rp. 20.000,-/bulan

kelas B 500 m² ke bawah : Rp. 10.000,-/bulan

* 1. Bengkel/servis :

kendaraan roda 4 ke atas : Rp. 10.000,-/bulan

kendaraan roda 2 : Rp. 5.000,-/bulan

* 1. Toko:

supermaket/swalayan :Rp. 20.000,-/bulan

rumah toko perpetak :Rp. 10.000,-/bulan

luas bangunan di atas 50 m² :Rp. 7.500,-/bulan

luas bangunan 25 m² s.d 50 m² :Rp. 5.000,-/bulan

luas bangunan s.d 25 m² :Rp. 2.500,-/bulan

* 1. Hotel/Penginapan :

hotel :Rp. 20.000,-/bulan

wisma, penginapan dan mess :Rp. 15.000,-/bulan

* 1. Restoran, Bar, Rumah Makan, Warung / Kios

Garpu IV :Rp. 15.000,-/bulan

Garpu III :Rp. 12.500,-/bulan

Garpu II :Rp. 10.000,-/bulan

Garpu I :Rp. 7.000,-/bulan

Non Garpu :Rp. 5.000,-/bulan

* 1. Bioskop :Rp. 25.000,-/bulan
	2. Gudang Penyimpanan :Rp. 10.000,-/bulan
	3. Gedung Pertemuan/ Resepsi yang dipersewakan : Rp. 50.000,-/bulan
	4. Salon kecantikan :Rp. 15.000,-/bulan
	5. Tukang cukur :Rp. 7.500,-/bulan
	6. Tukang jahit :Rp. 7.500,-/bulan
	7. Apotik :Rp. 10.000,-/bulan
	8. Toko/Kios Pupuk :Rp. 7.500,-/bulan
	9. Kantor Swasta :Rp. 10.000,-/bulan
	10. Rumah Sakit /Balai Pengobatan Swasta
		+ - 1. Rumah sakit :Rp. 25.000,-/bulan
				2. Rumah sakit bersalin :Rp. 20.000,-/bulan
				3. Poliklinik/Balai pengobatan :Rp. 15.000,-/bulan
	11. Perusahaan, pertukangan, pengeringan,

 pengelolaan/sortir bahan-bahan perdagangan :Rp. 20.000,-/bulan

* 1. Pertunjukan pada tempat/lapangan terbuka

 untuk satu kali pertunjukan :Rp. 150.000,-

* 1. Pembuangan air kotoran melalui saluran

 dari pabrik, restoran,wisma, hotel dan bengkel :Rp. 10.000,-/bulan

* 1. Pesta pekawinan/hajatan :Rp. 50.000,-
	2. Pedagang kaki lima :Rp. 5.000,-/bulan

**BAB VIII**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak**

**Kartu Tanda Penduduk dan Akta**

**Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Pasal 14**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

1. kartu tanda penduduk;
2. kartu keterangan bertempat tinggal;
3. kartu identitas kerja;
4. kartu penduduk sementara;
5. kartu identitas penduduk musiman;
6. kartu keluarga; dan
7. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta**

**Pasal 15**

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Aktaditetapkan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp. 15.000,-
2. kartu keterangan bertempat tinggal WNA Rp. 100.000,-
3. kartu identitas kerja; Rp. 10.000,-
4. kartu penduduk sementara;
5. bagi WNI Rp. 10.000,-
6. bagi WNA Rp. 100.000.-
7. kartu identitas penduduk musiman; Rp. 5.000,-
8. Kartu Keluarga (KK) Rp. 7.000,-
9. Akta Catatan Sipil terdiri dari:
10. Akta Perkawinan (AP):
11. Bagi WNI di dalam kantor Rp. 150.000,
12. Bagi WNI di luar kantor Rp. 175.000,
13. Bagi WNA di dalam kantor Rp. 350.000,-
14. Bagi WNA di luar kantor Rp. 500.000,-
15. Akta Perceraian (AC):

Bagi WNI Rp. 325.000,-

Bagi WNA Rp. 500.000,-

Bila terlambat melapor melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan dari Pengadilan Negeri dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen).

1. Akta Pengesahan dan Pengakuan meliputi:
2. Pengakuan anak bagi WNI Rp. 100.000,
3. Pengakuan anak bagi WNA Rp. 150.000,-
4. Pengesahan anak bagi WNI Rp. 100.000,-
5. Pegesahan anak bagi WNA Rp. 150.000,-
6. Akta Ganti Nama (AGN) bagi warga negara asing Rp. 150.000,-
7. Akta Kematian:
8. Akta kematian bagi WNI Rp. 10.000,
9. Akta kematian bagi WNA Rp. 50.000,-

**BAB IX**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 17**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 18**

1. Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya penyediaan marka jalan dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir dan biaya pembinaan
2. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
3. Tarif Retribusi Parkir di tepi Jalan umum ditetapkan sebagai berikut :
4. Kendaraan besar
5. Truk Gandeng Rp. 5.000/Parkir
6. Truk Tanpa Gandeng Rp. 3.000/Parkir
7. Kendaraan Kecil/Sedang
8. Mobil Bus, Pick Up, Sedan dan sejenisnya Rp. 2.000/Parkir
9. Sepeda Motor Rp. 1.000/Parkir
10. Bendi/Grobak Rp. 500/Parkir
11. Becak & Sepeda Rp. 500/Parkir

**BAB X**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar.

**Pasal 20**

1. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 21**

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, lods dan/atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan klasifikasi tipe pasar dalam Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut :
3. Pasar Tipe A, yaitu meliputi :
4. Pasar Mattirowalie;
5. Pasar Pekkae;
6. Pasar Takkalasi;
7. Pasar Mangkoso; dan
8. Pasar Palanro.
9. Pasar Tipe B, yaitu meliputi :
	1. Pasar Lisu;
	2. Pasar Ralla;
	3. Pasar Cilellang.
10. Pasar Tipe C, yaitu meliputi :
	1. Pasar Doi-Doi;
	2. Pasar Libureng;
	3. Pasar Tompo Lemolemo;
	4. Pasar Gattareng;
	5. Pasar Bulo-Bulo;
	6. Pasar Ele;
	7. Pasar Bungi;dan
	8. Pasar Ajakkang.
11. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
12. Pasar Tipe A sebagai berikut :
13. Sewa kios setiap bulan sebesar : Rp. 15.000,-/m2
14. Sewa Lods setiap bulan sebesar : Rp. 10.000,-/m2
15. Lods Ikan setiap bulan sebesar : Rp. 25.000,-/m2
16. Sewa Pelataran setiap bulan sebesar : Rp. 5.000,-/m2
17. Pasar Tipe B, besarnya tarif sebagai berikut :
18. Sewa kios setiap bulan sebesar : Rp. 7.500,-/m2
19. Sewa Lods setiap bulan sebesar : Rp. 5.000,-/m2
20. Lods Ikan setiap bulan sebesar : Rp. 12.000,-/m2
21. Sewa Pelataran setiap bulan sebesar : Rp. 4.000,-/m2
22. Pasar Tipe C besar tarifnya sebagai berikut :
23. Sewa kios setiap bulan sebesar : Rp. 7.500,-/m2
24. Sewa Lods setiap bulan sebesar : Rp. 5.000,-/m2
25. Sewa Pelataran setiap bulan sebesar : Rp. 2.000,-/m2
26. Bea/sussung pasar setiap hari pasar :
27. Lods dan Kios untuk setiap tempat sebesar :
28. Tipe A : Rp. 1.500,-
29. Tipe B : Rp. 1.000,-
30. Pelataran untuk setiap tempat sebesar : Rp. 1.000,-
31. Penggunaan fasilitas WC sekali penggunaan :
32. Mandi atau cuci : Rp. 3.000,-/orang
33. Buang air besar : Rp. 2.000,-/orang
34. Buang air kecil : Rp. 1.000,-/orang
35. Pasar Desa pengelolaannya dapat diserahkan pada Pemerintah Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi ataspelayananpengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 23**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 24**

1. Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
3. Pengujian untuk pertama kali :
	* 1. Mobil Bus terdiri dari :
4. Mobil bus besar 35 kursi keatas : Rp.125.000,-
5. Mobil bus sedang 15 kursi s/d 34 kursi : Rp.100.000,-
6. Mobil bus kecil 9 kursi s/d 14 kursi : Rp. 75.000,-
	* 1. Mobil barang terdiri dari :
			1. Truck roda 8 (delapan) keatas : Rp.150.000,-
			2. Truck roda 6 (enam) : Rp.125.000,-
			3. Truck roda 4 (empat) : Rp.100.000,-
		2. Mobil Penumpang Umum/Pick Up : Rp. 75.000,-
		3. Kereta Gandengan/kereta tempelan : Rp.150.000,-
		4. Kendaraan bermotor beroda tiga : Rp. 50.000,-
7. Pengujian berkala:
8. Mobil Bus terdiri dari :
	* + 1. Mobil bus besar 35 kursi keatas : Rp. 45.000,-
			2. Mobil bus sedang 15 kursi s/d 34 kursi : Rp. 35.000,-
			3. Mobil bus kecil 9 kursi s/d 14 kursi : Rp. 30.000,-
9. Mobil barang terdiri dari :
10. Truck roda 8 (delapan) keatas : Rp. 45.000,-
11. Truck roda 6 (enam) : Rp. 35.000,-
12. Truck roda 4 (empat) : Rp. 30.000,-
13. Pick Up : Rp. 25.000,-
14. Mobil Penumpang Umum : Rp. 25.000,-
15. Kereta Gandengan/kereta tempelan : Rp. 50.000,-
16. Kendaraan khusus :
17. Roda 6 (enam) : Rp. 45.000,-
18. Roda 4 (empat) : Rp. 35.000,-
	* 1. Kendaraan bermotor beroda tiga : Rp. 20.000,-
19. Pengujian/penilaian fisik untuk kendaraan penghapusan:
20. Mobil bus besar : Rp.300.000,-
21. Mobil bus sedang : Rp.250.000,-
22. Mobil bus kecil/Mobil Penumpang : Rp.200.000,-
23. Mobil barang terdiri dari :
	* + 1. Truck roda 8 (delapan) keatas : Rp.300.000,-
			2. Truck roda 6 (enam) : Rp.250.000,-
			3. Truck roda 4 (empat) : Rp.200.000,-
			4. Pick Up : Rp.150.000,-
			5. Sepeda Motor : Rp. 75.000,-
24. Kendaraan Bermotor di Atas Air
25. Kapal Ukuran lebih kecil dariGT 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) sebesar Rp. 25.000,-
26. Kapal Ukuran lebih kecil dari GT 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) sebesar Rp. 35.000,-
27. Kapal Ukuran lebih kecil dari GT 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) sebesar Rp. 45.000,-
28. Kapal Ukuran lebih kecil dari GT 7 (tujuh) sampai dengan 7 (tujuh) sebesar Rp. 55.000,-

**BAB XII**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

**Pasal 25**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta.

**Pasal 26**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

**Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

1. Ukuran Kertas A0 (1.189 mm x 841 mm) setiap jenis peta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlembar.
2. Ukuran Kertas A1 (841 mm x 594 mm) setiap jenis peta sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perlembar.
3. Ukuran Kertas A2 (594 mm x 420 mm) setiap jenis peta sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembar.
4. Ukuran Kertas A3 (420 mm x 297 mm) setiap jenis peta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perlembar.
5. Ukuran Kertas Kuarto dan Folio A4 (9 mm x 841 mm) setiap jenis peta sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) perlembar.

**BAB XIII**

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Tera/Tera Ulang**

**Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang.

**Pasal 29**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

1. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
2. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang**

**Pasal 30**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS ALAT UTTP** | **TERA / PENGESAHAN/ PEMBATALAN (Rp)** | **TERA ULANG/****PENGESAHAN (Rp)** |
| A.1. | Ukuran Panjang :1. Lebih panjang dari 10 meter dan setiap 10 meter berikutnya dihitung 10 meter;
2. 2 (dua) meter s.d 10 (sepuluh) meter;
3. Kurang dari 2 (dua) meter
 | 9.0004.5003.000 | 6.0003.0002.000 |
| 2. | Pemaras | 1.000 | 500 |
| 3. | Takaran Basah dan Takaran Kering :a. lebih besar dari 25 (dua puluh lima) liter;b. 5 (lima) liter s.d 25 (dua puluh lima) liter;c. kurang dari 5 (lima) liter; | 2.5001.5001.000 | 1.5001.000500 |
| 4. | Anak Timbangan Biasa :a. 10 (Sepuluh) kg s.d 50 (lima puluh) kg;b. 2 (dua) kg s.d 5 (lima) kg;c. kurang dari 2 (dua) kg; | 10.0003.0001.000 | 5.0002.000500 |
| 5. | Anak Timbangan Halus :a. lebih dari 1 (satu) kg;b. sampai dengan 1 (satu) kg;c. Anak Timbangan Miligram; | 1.5001.000500 | 1.5001.000500 |
| 6. | Timbangan Untuk Menimbang Biasa :a. kekuatan 1000 (seribu) kg s.d 3000 (tiga ribu) kg;b. kekuatan 250 (dua ratus lima puluh) kg s.d kurang dari 1000 (seribu) kg;c. kekuatan 100 (seratus) kg sampai kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) kg;d. kekuatan 26 (dua puluh enam) kg s.d kurang dari 100 (seratus) kg;e. kekuatan sampai dengan 25 (dua puluh lima) kg. | 50.00025.00012.00010.0007.500 | 30.00015.00010.0007.5005.000 |
| 7. | Timbangan Untuk Menimbang Halus :a. kekuatan diatas 100 (seratus) gram;b. kekuatan s.d 100 (seratus) gram. | 25.00020.000 | 20.00015.000 |
| 8. | Meter Kadar Air | 60.000 | 50.000 |

9. Timbangan untuk menimbang dengan kekuatan lebih dari 3.000 kg :

a. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera Rp.10.000,- tiap 1.000 (seribu) kg;

b. biaya pengesahan pada tera ulang Rp. 5.000,-tiap 1.000 (seribu) kg;

 Bagian-bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 (seribu) kg baik tera maupun tera ulang.

10. Timbangan dengan 2 (dua) skala atau lebih yang masing-masing skala tera atau tera ulang atau diuji atau diperiksa sendiri, maka tiap skala dikenakan biaya sebesar angka 6 (enam) atau angka 7 (tujuh), atau angka 10 (sepuluh) ayat ini.

11. Meter arus minyak :

a. Meter Kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam m3/h) sebagai berikut:

1. 100 m3/h pertama Rp. 2.000,- tiap m3/h dengan ketentuan minimum Rp. 50.000,-
2. Selebihnya dari 1000 m3/h s.d 500 m3/h Rp. 1.000 tiap m3/h.

Bagian-bagian dari m3/h menjadi 1 (satu) m3/h.

b. Meter Induk

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m3/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

1. meter induk yang digunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan kekuatan minimum Rp. 100.000,-
2. meter induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan kekuatan minimum Rp. 150.000,-

c. Meter Prover

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak-balik antara 2 (dua) detecter switch (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

1. Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut :
2. 2.000 liter pertama sebesar Rp. 1.000,- perliter dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-;
3. Di atas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif (a);
4. Di atas 10.000 liter sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif (a).

 Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi 1 (satu) liter dan tarifnya disesuaikan.

1. Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan dua pesawat meter prover yang terdiri dari 1 (satu) seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi (seksi sebesar I dan seksi sebesar II) meter prover yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 200.000,-

d. Pompa Ukur

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campur) :

1. Pompa ukur minyak murni Rp. 100.000,- tiap pesawat
2. Pompa ukur minyak campur Rp. 150.000,- tiap pesawat.

12. Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi)

a. Meter Kerja

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m3/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut :

1. Kapasitas maksimum di atas 500 m3/h Rp. 10.000,- tiap pesawat
2. Kapasitas maksimum di atas 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h Rp. 5.000,- tiap pesawat;
3. Kapasitas maksimum di atas 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h Rp. 3.000,- tiap pesawat;
4. Kapasitas maksimum dari atau sampai dengan 10 m3/h Rp. 2.000,- tiap pesawat;

b. Meter Induk

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.

c. Meter Gas Orifis

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.

13. Meter Air

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimumnya (dalam m3/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

1. Kapasitas di atas 100 m3/h h Rp. 15.000,- tiap pesawat;
2. Kapasitas di atas 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h Rp. 10.000,- tiap pesawat;
3. Kapasitas kurang dari atau sampai dengan 10 m3/h Rp. 2.000,- tiap pesawat.

14. Meter Listrik

a. Meter kWh

* 1. Meter Kerja

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m3/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

1. Rp. 7.000,- tiap pesawat 3 (tiga) fasa;
2. Rp. 2.000,- tiap pesawat 1 (satu) fasa.
	1. Meter Induk 1 (satu) fasa

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.

 b. Meter Pembatas Arus

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 1.500,- tiap pesawat.

15. Tangki Ukur Tetap

a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut :

* 1. kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 250,-
	2. Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp. 200,- setiap kiloliter;
	3. Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- sampai setiap kiloliter;
	4. Bagian-bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.

b. untuk tangki ukur tetap silinder datar biaya tersebut pada huruf a, angka ini ditambah 25% (dua puluh lima persen).

c. untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur perodial biaya tersebut pada huruf a, angka ini ditambah 50% (lima puluh persen).

16. Tangki Ukur Berat

a. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur mobil dan tangki ukur cikar atau tangki ukur wagon dihitung Rp. 10.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 50.000,-;

b. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal (tangker) atau tangki ukur pindah dihitung sebagai berikut :

* + 1. 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 150.000,-
		2. Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter minimum Rp. 200,- setiap kiloliter;
		3. Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- setiap kiloliter; bagian-bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter.

c. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur apung dihitung sesuai dengan ketentuan angka 17 huruf a dan b.

17. Alat Ukur Gelas

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, bure dan semacamnya adalah sebesar Rp. 1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp. 15.000,-

18. Bejana Ukur

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung sebagai berikut :

a. kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter Rp. 100.000,- tiap pesawat;

b. kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter Rp. 75.000,- tiap pesawat;

c. kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp. 50.000,- tiap pesawat;

d. kapasitas 50 liter dan kurang Rp. 40.000,- tiap pesawat;

e. kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf a angka ini ditambah Rp. 20.000,- tiap pesawat.

19. Meter Taksi

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung sebagai berikut :

a. meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp. 12.500,- tiap pesawat;

b. meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp. 20.000,- tiap pesawat.

20. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan Sejenisnya

 Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung sebagai berikut :

1. yang berbentuk bilah berlaku ketentuan dalam huruf a nomor ayat ini untuk setiap pesawat;
2. yang mekanik dengan alat hitung Rp. 15.000,- tiap pesawat;
3. yang elektronik dengan alat hitung Rp. 20.000,- tiap pesawat.

21. Alat Ukur Tinggi

a. Alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan huruf a nomor 1 ayat ini;

b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan panjang secara mekanik atau elektronik dikenakan biaya Rp. 10.000,- tiap meter;

c. Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

22. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang atas:

 a. Penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;

b. Penghitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;

 c. Meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;

 d. Meter parker dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;

 e. Neraca analisa dihitung Rp. 25.000,- tiap pesawat; dan

 f. Neraca substitusi dihitung Rp. 50.000,- tiap pesawat.

23. Biaya Pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera ulang dihitung tiap Rp. 2.000,- dengan minimum biaya Rp. 20.000,- terhadap :

 a. Termometer;

 b. Mesin ukur luas dan alat ukur luas;

 c. Alat ukur sudut;

 d. Balok ukur (block gauge);

 e. Mikrometer;

 f. Areometer dan densimeter;

 g. Perlengkapan meter gas orifis;

 h. Perlengkapan meter arus minyak;

i. UTTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 di bawah ini.

 j. bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.

24. Biaya pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut :

a. 100 ton/h pertama Rp. 4.000,- tiap ton/h dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-;

 b. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Rp. 4.000,- tiap ton/h;

 c. lebih dari 500 ton/h Rp. 10.000,- tiap ton/h;

 d. bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton.

25. Biaya pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebankan dari tera atau tera ulang dihitung Rp. 20.000 tiap pesawat.

B. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf A nomor 7, dan nomor 10 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :

 1. Rp. 1.000,- tiap pesawat dari timbangan sentisimal;

 2. a. Rp. 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih;

 b. Rp. 1.000,- tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau kurang;

 3. a. Rp. 2.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kuadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau lebih;

 b. Rp. 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kuadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau kurang.

 4. Rp. 25.000,- tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbangan atau mesin pengisi ditambah dengan biaya bagian A angka 6 ayat ini;

 5. Rp. 5.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;

 6. Rp. 20.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;

 7. Rp. 50.000,- tiap pesawat untuk timbangan AMP dan Batching Plant.

C. Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya dihitung Rp. 10.000,- tiap jam tiap pesawat dengan minimum sebesar Rp. 100.000,-.

 Bagian-bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.

D. Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

* + - 1. Ditanam; atau
			2. mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus; atau
			3. Tidak ditanam tetapi berkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau ditempat terkumpul, dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, juga dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Alat-alat ukur, takar, timbang dan perkengkapannya yang :** | **Sebesar (Rp)** |
| 1.2.3.4. | Ditanam;Mempunyai sifat dan/atau konstruksi khususTidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat;Tidak ditanam yang terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau di tempat pesawat mempunyai kekhususan. | 10.000,- / pesawat5.000,- / pesawat dengan minimum 25.000,-5.000,- / pesawat dengan minimum 25.000,-5.000,- / pesawat dengan minimum 25.000,- |

E. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilunasi sesuai jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera atau tera ulang, atau dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan, dikembalikan pada pembawa/wajib retribusi.

F. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dibebankan kepada pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

G. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilaporkan oleh pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang berwenang untuk itu.

**BAB XIV**

**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek RetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 31**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

**Pasal 32**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 33**

1. Maksud dan tujuan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas pengendalian dan pengawasan untuk pendirian bangunan menara telekomunikasi.
2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
3. Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

**BAB XV**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 34**

Retribusi Jasa Umum dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa yang diberikan.

**BAB XVI**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 35**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**

**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 36**

1. Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVIII**

**KEBERATAN**

**Pasal 37**

1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 38**

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
3. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 39**

1. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XIX**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 40**

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
7. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX**

**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 41**

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**BAB XXI**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 42**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXII**

**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 43**

1. Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
2. Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
3. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
4. Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
5. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXIII**

**INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 44**

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXIV**

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 45**

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 46**

Pembinaaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXVI**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 47**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
4. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
5. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
6. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
7. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
8. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
9. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
10. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
11. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
12. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. menghentikan penyidikan; dan/atau
14. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXVII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 48**

* + 1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
		2. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
		3. Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXVIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 49**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXIX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

* 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor 3 Seri B Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 44);
	2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor 11 Seri B Nomor 9);
	3. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2001 Nomor 20);
	4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 34);
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 45);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

**Pasal 51**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal

**BUPATI BARRU,**

 **ANDI IDRIS SYUKUR**

Diundangkan di Barru

pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011 NOMOR**